

# IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE SMART DESA DIGITAL DI DESA TEGAL ANGUS KECAMATAN TELUKNAGA

*by* Muhamad Nur Adillah

---

**Submission date:** 08-Oct-2024 11:37AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2478776975

**File name:** Journal\_5\_\_MUHAMAD\_NUR\_ADILLAH\_2001010030.doc (90K)

**Word count:** 4015

**Character count:** 27245

# IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE SMART DESA DIGITAL DI DESA TEGAL ANGUS KECAMATAN TELUKNAGA

<sup>1</sup>Muhamad Nur Adillah; <sup>2</sup>Ahmad Murodi; <sup>3</sup>Yudi Muhtadi

<sup>13</sup>  
<sup>1</sup> Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ,Banten, Indonesia,  
Email : [mhmnuradillah13@gmail.com](mailto:mhmnuradillah13@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang,Banten, Indonesia  
Email: [amurodi@unis.ac.id](mailto:amurodi@unis.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Banten, Indonesia  
Email : [tubagusyudi1969@unis.ac.id](mailto:tubagusyudi1969@unis.ac.id)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi e-government pada layanan informasi publik melalui website smart desa digital, faktor-faktor yang menjadi hambatan, dan upaya dalam mengatasi faktor hambatan tersebut guna meningkatkan layanan informasi publik melalui web site smart desa digital di Desa Tegal Angus. Peneliti menggunakan teori Edward III dalam Subarsono, 2011:90-92 dengan empat indikator yaitu; 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur birokrasi, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Komunikasi dinilai efektif dengan pemerintah desa dengan melakukan sosialisasi. Namun, sumber daya manusia dan non-manusia, seperti kualitas SDM, akses internet, dan latar belakang pendidikan, masih menjadi kendala utama. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut meliputi pelatihan teknologi digital, penyuluhan melalui media sosial, bantuan teknis langsung, dan promosi oleh tokoh masyarakat.

**Kata Kunci : Implementasi E-Government, Layanan Informasi Publik, Website Smart Desa Digital.**

## Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of e-government in public information services through the digital village smart website, the factors that become obstacles, and efforts to overcome these obstacle factors in order to improve public information services through the digital village smart website in Tegal Angus Village. . Researchers use Edward III's theory in Subarsono, 2011:90-92 with four indicators, namely; 1) Communication; 2) Resources; 3) Disposition; and 4) Bureaucratic structure, with descriptive qualitative research methods. The results of this research are that communication is considered effective with the village government by conducting outreach. However, human and non-human resources, such as the quality of human resources, internet access, and educational background, are still the main obstacles. Efforts to overcome these obstacles include digital technology training, outreach via social media, direct technical assistance, and promotions by community leaders.

**Keywords: E-Government Implementation, Public Information Services, Smart Digital Village Website.**

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada pola hidup masyarakat. Dinamika dan kecepatan kehidupan masyarakat kini menjadi hasil dari kemajuan teknologi informasi. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan teknologi ini dalam kegiatan sehari-hari mereka. Saat ini, internet menjadi salah satu teknologi penyebaran informasi yang tengah berkembang pesat. Internet memberikan kemudahan dalam pencarian sumber informasi dan menyediakan jalur penyebaran informasi yang cepat sesuai kebutuhan. Masyarakat kini telah akrab dengan dunia internet, yang memberikan pelayanan publik yang dapat diakses 24 jam sehari, kapan pun, dan dari mana pun lokasi pengguna berada. Selain itu, teknologi internet juga memungkinkan pelayanan publik tanpa perlu interaksi langsung, menjadikan proses pelayanan lebih efisien..

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut telah mengamanahkan bagi setiap pemerintah daerah sebagai badan publik sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebaagian atau seluruh dananya brsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

Dalam prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dalam menyediakan layanan publik di Indonesia, langkah awal dimulai dengan kemunculan pemerintahan elektronik (e-government) pada dekade 2000-an. Konsep E-Government ini mencerminkan usaha untuk menyajikan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan platform digital atau jaringan internet. Mulai dari penyampaian informasi melalui situs web, interaksi antara badan publik dan masyarakat, pelaksanaan transaksi layanan, hingga integrasi semua lembaga pemerintah.

Kebijakan E-Government di Indonesia diperkuat oleh keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Konsep pengembangan E-Government di Indonesia ini bertujuan untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi guna menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih transparan dan fleksibel, tanpa keterbatasan birokratis yang kaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini mengandung dua aspek pokok, yakni: (1) Pentingnya instansi pemerintah mengembangkan pelayanan berbasis elektronik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi sebagai landasan untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat; (2) Pertimbangan terhadap efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap masyarakat, agar pelayanan publik dapat diakses lebih cepat, ekonomis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desa yang pada umumnya masih kurang mengenal sistem-sistem berbasis digital, pada era digital ini dituntut agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Desa yang menerapkan sistem teknologi digital dalam menjalankan pemerintahannya dapat disebut sebagai desa digital yang mempunyai peran penting untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas pemerintah desa Tegal angus menerapkan suatu Website yang digunakan untuk mendukung dalam pengembangan suatu desa yang ingin memenuhi harapan akan masyarakat luas dalam suatu Informasi yang akurat dan baik dari pengelolaan akses infomasi desa. Demi terciptanya kualitas pelayanan pubik yang cepat, dan efisien desa Tegal angus menghadirkan website smart desa digital untuk informasi dan pelayanan digital. Smart desa digital (SDD) merupakan sebuah aplikasi sistem informasi desa berbasis web yang dikembangkan khusus untuk membantu Desa – Desa atau kelurahan dalam melakukan pengelolaan data dan pelayanan publik, khususnya administrasi persuratan.

Sistem informasi desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi undang-undang desa. Dalam bagan ketiga UU desa pasal 86 tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasa pedesaan jelas di sebutkan bahwa desa berhak

mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang di kembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pengamat peneliti bahwa penggunaan website smart desa digital (SDD) di desa tegal angus terdapat beberapa kendala dan permasalahan antara lain : 1) Masalah SDM seperti masyarakat yang belum terkomunikasi atau masih belum melek teknologi, kurangnya komunikasi antara pemerintah (implementor) dan masyarakat (kelompok sasaran) sehingga terjadi distorsi dalam proses implementasi program ini dan juga masyarakat yang belum terbina TIK sulit menerima implementasi program digitalisasi ini; 2) Masalah pada operasional website Desa, kekurangan implementor yang kompeten dan sumber daya finansial membuat implementasi kebijakan tidak terlaksana dengan baik. Ada beberapa masalah di website desa servernya mati sehingga masyarakat tidak bisa mengakses website Desa.

Hal ini menjadi masalah sehingga pelayanan berbasis website Smart Desa Digital (SDD) di Desa Tegal Angus belum optimal penggunaannya. kemudian ini masih menjadi permasalahan yang menghasilkan dampak pengguna website smart Desa digital di Desa Tegal Angus masih rendah penggunaannya Dari 7.660 jiwa.

Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92), yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi. Sehingga dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan sesuai acuan indikator tersebut.

Sedangkan, menurut *The World Bank Group* (M.Sufriyadi, 2014) e-Government merupakan upaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sedangkan, menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Riyanto dalam (Anonymous, 2018) Pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain dalam suatu hubungan dengan tujuan mendatangkan kepuasan kepada pihak kedua terkait dengan barang dan jasa yang diberikan

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (Iii, 2014) adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan tentang tingkah laku orang-orang yang dapat diamati. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah serangkaian kegiatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang realistis dalam kondisi tertentu. Keputusan dan hasil lebih menekankan pada makna dari pada alasan. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi. Dengan pendekatan *post positivisme*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan hasil wawancara sehingga peneliti mendapatkan data yang valid serta Gambaran yang akan menjawab permasalahan hingga ditarik menjadi kesimpulan lalu disertakan dokumentasi. Selanjutnya pada bab ini menganalisa dari berbagai sisi dengan tujuan penelitian yaitu.

### 3.1 Implementasi E-Government Pada Layanan Informasi Publik Berbasis Website Smart Desa Digital Di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga.

Dalam implementasi e-government untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan Masyarakat merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk

mengetahui bagaimana implementasi e-government pada layanan informasi publik berbasis website Smart Desa Digital di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga ini menggunakan teori indikator implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut hasil dan pembahasan wawancara yang berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Edward III dalam Subarsono, 2011: 90-92) :

### 3.1.1 Indikator komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan pemberian rekomendasi pemanfaatan penggunaan website smart desa digital di Desa Tegal Angus. Tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik individual, dalam kelompok ataupun organisasi.

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh kasi pelayanan Desa Tegal Angus yaitu dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan Stakeholder terkait dalam memberikan informasi tentang layanan publik berbasis website Smart Desa Digital di Desa Tegal Angus. Pada proses sosialisasi ini dilakukan antar instansi pemerintah melalui web-web terpadu milik Kabupaten Tangerang.

Website Smart Desa Digital ini menjadi wadah bagi pemerintah Desa Tegal Angus, untuk mendorong kemudahan pelayanan publik bagi Masyarakat di Desa Tegal Angus. Dengan adanya website smart desa digital ini, diharapkan dapat mempermudah Masyarakat untuk mengakses layanan publik di Desa Tegal Angus.

Website Smart Desa Digital merupakan salah satu integrasi dari berbagai aplikasi atau website pelayanan publik yang ada. Seperti layanan sistem informasi pelayanan terpadu kecamatan dan kelurahan (SiPatén), sistem informasi pemakaman dan pertanahan (SIMAPAN). Selain itu, dalam website smart desa digital ini juga terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk mengakses layanan informasi publik. Diantaranya ada layanan mandiri, Dimana pemerintah dapat membuat akses bagi warga untuk melakukan layanan "Self Service". Dengan data yang dikelola pada menu ini warga dapat mengetahui Biodata Datanya yang tersimpan dalam sistem ini, warga pun bisa mengetahui bantuan-bantuan yang didapatkan dan warga juga dapat berperan aktif dengan memberikan laporan-laporan kepada pemerintah desa. Kemudahan dalam komunikasi dan mendapatkan informasi juga di rasakan oleh Masyarakat.

Komunikasi yang terjalin melalui website Smart Desa Digital ini dapat dikatakan sudah cukup baik, karena Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan informasi publik pada website Smart Desa Digital ini. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator komunikasi maka dapat disimpulkan bahwa pada layanan website Smart Desa Digital sudah dikatakan cukup baik. Hal ini dilihat dari komunikasi yang terjalin antara pemerintah Desa Tegal Angus kepada Masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi terkait dalam layanan informasi publik website Smart Desa Digital serta memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah Desa untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang berita update wilayah Desa Tegal Angus melalui website Smart Desa Digital ini.

### 3.1.2 Indikator sumberdaya

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.<sup>8</sup>

Implementasi e-Government tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Kualitas sumber daya manusia mengacu pada keterampilan, dedikasi, profesionalisme dan kompetensi di bidangnya,

sedangkan kuantitas mengacu pada apakah kuantitas sumber daya manusia cukup untuk mencakup seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya manusia di Desa Tegal Angus ini di nilai kurang memadai sehingga pelayanan yang di berikan belum maksimal. Hal ini dilihat dari penggunaan website Smart Desa Digital yang masih sedikit digunakan oleh masyarakat. Karena fitur di Smart Desa Digital ini belum banyak sehingga kurang menjadi perhatian bagi Masyarakat Desa Tegal Angus.

Selain itu, sumber daya non-manusia juga mencakup permodalan yang sesuai Ketersediaan sarana dan prasarana juga penting untuk keberhasilan Implementasi e-Government. Pada website Smart Desa Digital ini Masyarakat Desa Tegal Angus yang mayoritas tinggal di pedesaan menghadapi kendala teknologi, seperti akses internet, dan pengetahuan teknologi yang masih kurang. Kurangnya keseragaman perkembangan dan difusi teknologi di masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan digital, khususnya pada masyarakat pedesaan. Mengingat pertumbuhan jumlah pengguna Internet, rendahnya tingkat kepemilikan dan penggunaan teknologi di masyarakat pedesaan adalah salah satu alasan mengapa masyarakat pedesaan mengalami tingkat kesenjangan digital yang lebih tinggi.

Sumber daya manusia di Desa Tegal Angus ini minim pemanfaatan teknologi digital secara sehat. Artinya bagi Masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Masyarakat di Desa Tegal Angus cenderung memanfaatkan teknologi untuk keperluan media sosial saja seperti *Instagram* dan *tiktok* sehingga penggunaan website layanan publik berbasis digital ini kurang di minati oleh Masyarakat Desa Tegal Angus.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator sumberdaya ini dapat dikatakan belum maksimal hal ini dapat di lihat dari keterbatasan masyarakat Desa Tegal Angus mengakses internet dan teknologi digital, latar belakang pendidikan masyarakat yang juga menjadi minimnya pengetahuan teknologi digital khususnya masyarakat desa. Serta pemanfaatan teknologi digital yang kurang cermat sehingga Masyarakat Desa Tegal Angus ini cenderung menggunakan teknologi hanya untuk keperluan media sosial saja.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan Menunjukkan hasil belum maksimal. Hal ini dapat di lihat dari keterbatasan masyarakat Desa Tegal Angus mengakses internet dan teknologi digital, latar belakang pendidikan masyarakat yang juga menjadi minimnya pengetahuan teknologi digital khususnya masyarakat desa. Serta pemanfaatan teknologi digital yang kurang cermat sehingga Masyarakat Desa Tegal Angus ini cenderung menggunakan teknologi hanya untuk keperluan media sosial saja.

### 3.1.3 Indikator disposisi

Disposisi adalah kepribadian dan sifat yang dimiliki seorang direktur, seperti dedikasi, kejujuran, dan demokrasi. Apabila pelaksanaanya beritikad baik maka ia dapat mengelola e-Government sesuai dengan keinginan pencipta e-Government. Ketika sutradara mempunyai sikap atau sudut pandang. Berbeda dengan pengambil keputusan e-Government, proses implementasi e-Government juga tidak akan efektif. Website smart desa digital yang di rancang untuk mempermudah pelayanan Masyarakat ini juga mempermudah proses disposisi yang di lingkungan pemerintah Desa.

Hakikatnya pelayanan informasi publik adalah pemberian layanan kepada pemohon informasi publik secara cepat dan efisien serta biaya yang ringan/proporsional dan cara sederhana, pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan layanan informasi. Hal ini selaras dengan website smart desa digital Desa Tegal Angus yang mempercepat layanan informasi di Desa Tegal Angus. Website smart desa digital memberikan kemudahan bagi Masyarakat yang melakukan pelayanan surat menyurat seperti surat keterangan, surat perizinan, surat pengantar, dan surat izin lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menurut indikator disposisi menunjukkan hasil disposisi yang baik hal ini terlihat dalam hal surat menyurat bisa di lakukan menggunakan website smart desa digital ini seperti surat keterangan, surat perizinan, surat pengantar dan juga surat surat lainnya sehingga memberika efisiensi waktu bagi Masyarakat.

Menunjukkan hasil disposisi yang baik hal ini terlihat dalam hal surat menyurat bisa di lakukan menggunakan website smart desa digital ini seperti surat keterangan, surat perizinan, surat pengantar dan juga surat surat lainnya sehingga dapat memberikan efisiensi waktu bagi

Masyarakat. Sehingga dapat mengurangi adanya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang lekat pada layanan publik di Indonesia.

#### **3.1.4 Indikator Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan suatu struktur organisasi yang mengatur Penggunaan *e-Government* mempunyai dampak yang signifikan terhadap penggunaan *e-Government*. Sangat terorganisir akhirnya akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan inovasi, yang merupakan proses lama yang rumit dan rumit Organisasi kerja tidak fleksibel. Website smart desa digital ini memberikan kemudahan birokrasi kepada Masyarakat karena tidak lagi mendapatkan layanan yang berbelit-belit.

Dalam implementasi *e-government* layanan informasi publik melalui website Smart Desa Digital di Desa Tegal Angus selain memberikan kemudahan kepada Masyarakat juga terdapat beberapa kendala yang di rasakan oleh Masyarakat diantaranya dalam menggunakan website Smart Desa Digital, antara lain keterbatasan infrastruktur teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil dan peralatan yang tidak memadai, terbatasnya literasi digital, kesulitan dalam memahami konten yang relevan dan pembaruan rutin. Sehingga membuat Masyarakat harus tetap menggunakan pelayanan secara manual.

Dari beberapa hasil dari wawancara yang di lakukan kepada Masyarakat ini menunjukkan hasil birokrasi yang belum optimal hal ini terjadi karena layanan public yang ada di website Smart Desa Digital ini masih sedikit dan belum menyeluruh Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi dalam website Smart Desa Digital belum optimal. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya fitur pada layanan informasi publik yang disediakan oleh website tersebut, yang belum mencakup semua jenis layanan publik. Sehingga, masyarakat masih harus datang langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan publik, menunjukkan bahwa unsur struktur birokrasi dalam aplikasi ini belum maksimal.

Menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini terlihat belum lengkapnya fitur pada layanan informasi publik yang disediakan oleh website tersebut, yang belum mencakup semua jenis layanan publik. Sehingga, masyarakat masih harus datang langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan publik, menunjukkan bahwa unsur struktur birokrasi dalam aplikasi ini belum maksimal.

#### **3.2 Faktor – faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam layanan informasi publik melalui website smart desa digital di Desa Tegal Angus**

Dalam pelaksanaan implementasi *e-government* dalam layanan informasi publik berbasis website smart desa digital di Desa Tegal Angus masih ada faktor yang menjadi hambatan dalam layanan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian empiris pada indikator sumberdaya di temukan hambatan pada sumber daya manusia di Desa Tegal Angus yang minim kesadaran dalam pemanfaatan teknologi tidak semua faham tentang teknologi digital, Masyarakat Desa Tegal Angus cenderung memanfaatkan teknologi untuk media sosial saja seperti *Instagram* dan *tiktok* hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi *e-government* pada layanan informasi publik berbasis website smart desa digital di Desa Tegal Angus.
2. Berdasarkan penelitian empiris pada indikator komunikasi di temukan adanya faktor hambatan Meskipun ada upaya sosialisasi, banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami atau menyadari keberadaan dan fungsi website Smart Desa Digital. Sosialisasi yang dilakukan mungkin belum mencapai seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
3. Berdasarkan penelitian empiris pada indikator disposisi pengelola e-Government di Desa Tegal Angus mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen atau memberikan dukungan penuh terhadap implementasi website Smart Desa Digital. Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, pelaksanaan dan pengembangan website dapat terhambat.
4. Berdasarkan penelitian empiris pada indikator struktur birokrasi Website Smart Desa Digital di Desa Tegal Angus belum menyediakan seluruh jenis layanan publik yang diperlukan.

Keterbatasan fitur ini mengakibatkan masyarakat harus tetap mengunjungi kantor desa untuk beberapa layanan, mengurangi efektivitas sistem digital.

### **3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor hambatan untuk layanan informasi publik melalui website smart desa digital di Desa Tegal Angus.**

Berdasarkan hambatan yang ada di atas, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor hambatan untuk layanan informasi yaitu sebagai berikut :

1. menyelenggarakan workshop dan seminar mengenai pemanfaatan teknologi digital dan manfaat sumber daya perpustakaan digital umum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selain itu, memberikan kursus dan tutorial online yang dapat diakses masyarakat umum kapan pun mereka ingin membantu mereka lebih memahami layanan digital.
2. memanfaatkan media sosial dan website desa untuk menyebarluaskan informasi tentang layanan publik digital dengan konten yang menarik seperti infografis dan video tutorial.
3. menugaskan petugas atau relawan untuk membantu masyarakat secara langsung dalam mengakses dan menggunakan layanan publik digital serta menjawab pertanyaan mereka. Klinik teknologi juga akan diadakan di balai desa atau pusat komunitas untuk memberikan bantuan teknis dan informasi yang dibutuhkan.
4. melibatkan pemimpin desa dan tokoh masyarakat untuk mempromosikan penggunaan layanan digital dan memberikan contoh langsung. Dukungan dari tokoh lokal akan membantu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam layanan digital.
5. Mengembangkan fitur website untuk mencakup seluruh layanan publik dan memastikan integrasi dengan sistem lain di tingkat kabupaten dan kecamatan.

## **4. KESIMPULAN**

Implementasi website Smart Desa Digital di Desa Tegal Angus bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan pelayanan publik antara pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan teori indikator implementasi kebijakan Edward III, berikut adalah kesimpulan dari hasil evaluasi:

1. Indikator Komunikasi: Komunikasi dalam pelaksanaan website Smart Desa Digital sudah cukup baik. Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran dan melibatkan stakeholder untuk menyampaikan informasi dan memberikan akses kemudahan dalam layanan publik. Masyarakat merasa lebih mudah mengakses informasi dan layanan melalui website ini.
2. Indikator Sumber Daya: Sumber daya manusia dan non-manusia masih menjadi kendala utama. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai, dan keterbatasan akses internet serta latar belakang pendidikan masyarakat menghambat penggunaan teknologi secara maksimal. Masyarakat lebih familiar dengan media sosial dibandingkan dengan layanan publik digital.
3. Indikator Disposisi: Disposisi terhadap penggunaan website Smart Desa Digital menunjukkan hasil yang positif. Website ini mempermudah proses administrasi dan surat-menyurat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengurangi kemungkinan praktik KKN.

Indikator Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi belum optimal karena fitur layanan di website Smart Desa Digital belum lengkap. Hal ini mengakibatkan masyarakat masih perlu mengakses layanan secara manual untuk beberapa kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan terhadap implementasi *e-government* pada layanan informasi publik berbasis website smart desa digital di Desa Tegal Angus adalah sebagai berikut :



1. Bagi pemerintah  
Dalam implementasi e-government pada layanan informasi publik berbasis website smart desa digital di Desa Tegal Angus, pemerintah hendaknya harus memperbaiki konektivitas internet dan menyediakan perangkat teknologi yang memadai di desa untuk memastikan akses yang lancar bagi masyarakat serta Pemerintah harus menambah fitur layanan yang tersedia di website dan memastikan desainnya ramah pengguna, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.
2. Bagi masyarakat  
Masyarakat disarankan untuk mengikuti pelatihan atau program edukasi yang disediakan pemerintah tentang penggunaan teknologi dan website agar dapat memanfaatkan layanan dengan lebih efektif. Serta lebih cermat dalam menggunakan teknologi digital agar penggunaan layanan informasi publik berbasis digital dapat berjalan dengan optimal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M. (2019). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019. 8–30.
- Al-Ayyubi, M. S., Sulistiani, H., Muhaqiqin, M., Dewantoro, F., & Isnain, A. R. (2021). Implementasi E-Government untuk Pengelolaan Data Administratif pada Desa Banjar Negeri, Lampung Selatan. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(3), 491–497. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i3.6704>
- Alfarizi, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Indonesia Terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 169–178.
- Amrozi, Y., Cornelia, E., & Ainuriyah, L. (2022). Implementasi E-Government Pelayanan Publik Pada Aplikasi E-Kios. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 310. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8015>
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24.
- Anonymous. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 71–81. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.9>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2015). Those Activities directed toward putting a program into effect ".  
Karman, K., Deswanto, R., & Ningsih, S. A. (2021). Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 43–50. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1525>
- Kurniawan, I. A., Yusman, D., Kultsum, G. U., & Junianto, A. (2022). Implementasi E-Government Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 256–265. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5476>
- M.Sufriyadi. (2014). Analisis Penerapan E- Government Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Pekanbaru Selatan. *Motivation and Emotion*, 30(3), 243–250.
- Nofriandi, R. (2017). Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/II/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa. *Universitas Medan Area*, 9–44.
- Penelitian, P. I., & Arikuntoro, M. S. (n.d.). Instrumen Penelitian Kualitatif.
- Setiawan, A., Halimah, M., & Faidah, R. N. (2023). Implementasi E-Government Berbasis Situs Web. *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.353>
- Shafira, A., & Kurniasiwati, A. (2021). Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 52–68. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.457>
- Suci Pratiwi, C. (2020). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 2(1), 109–126. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.18>

Yulia Devi, A. (2018). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(Ppid)Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Indragiri Hulu. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 11–35.

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik

# IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE SMART DESA DIGITAL DI DESA TEGAL ANGUS KECAMATAN TELUKNAGA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to University of Melbourne Student Paper	2%
2	bantenhits.com Internet Source	2%
3	bisantara.amikparbinanusantara.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unas.ac.id Internet Source	1%
5	sahabatgo.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Amikom Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1%
8	elibrary.bsi.ac.id Internet Source	1%

webofscientist.pubmedia.id

9	Internet Source	1 %
10	<a href="http://disbudpar.jatimprov.go.id">disbudpar.jatimprov.go.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://www.jagoandigitalisticcomputer.com">www.jagoandigitalisticcomputer.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://digilib.uinsa.ac.id">digilib.uinsa.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://ejournal.insuriponorogo.ac.id">ejournal.insuriponorogo.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://ejournal.bappeda.bantenprov.go.id">ejournal.bappeda.bantenprov.go.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1 %
18	<a href="http://journal.uta45jakarta.ac.id">journal.uta45jakarta.ac.id</a> Internet Source	1 %
19	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	1 %
20	<a href="http://repository.umrah.ac.id">repository.umrah.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On

# IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE SMART DESA DIGITAL DI DESA TEGAL ANGUS KECAMATAN TELUKNAGA

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---